

B u l e t i n



Biro Pemberitaan Parlemen

# PARLEMENTARIA

**KOREKKU  
Jadi Momen  
Teladani  
Pengorbanan**

## DPR Awasi Penyelenggaraan Haji

**TIMWAS HAJI  
Timwas-Haji  
Antisipasi  
Layanan  
Puncak Haji**

Nomor 1346/I/VI/2025 Juni 2025



9 772614 339005



Media  
dari ri



FOTO: RDN/PDT

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di sela-sela kegiatan pengawasan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).

## DPR Awasi Penyelenggaraan Haji

**K**etua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan permintaan maaf dari Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar atas kekurangan pelayanan jemaah haji Indonesia tahun 2025. Menurut Cucun, permintaan maaf semestinya bukan menjadi bentuk penyelesaian, mengingat DPR RI telah sejak awal memberi peringatan terhadap potensi masalah teknis dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Sebetulnya kalau seorang

pejabat negara itu sah-sah saja meminta maaf terhadap suatu hal yang terkait kegagalan. Tapi menurut saya itu bukan hal yang bagus,” ujar Cucun kepada di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6).

Ia menegaskan bahwa DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan sudah sejak awal mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, mengenai potensi persoalan dalam pelayanan haji, terutama terkait perubahan sistem pelayanan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Saya sudah ingatkan waktu itu pada Pak Menteri Agama: hati-hati,

ini akan terjadi kejadian-kejadian yang harus diantisipasi. Tapi apa yang terjadi? Dari transportasi Mekah ke Arafah bermasalah, kemudian tenda di Arafah pun juga bermasalah,” ungkap Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB itu.

Menurutnya, permintaan maaf secara etika bisa dihargai, tetapi pemerintah semestinya menunjukkan kesiapan sejak awal, bukan merespons setelah persoalan muncul. Ia menilai pelayanan haji adalah siklus yang bisa dipelajari dari tahun ke tahun dan semestinya tidak ada alasan untuk tidak siap.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permintaan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas sejumlah kekurangan layanan selama pelaksanaan haji 1446 H/2025 M. Dalam keterangan resminya, Menag mengakui masih ada masalah dalam aspek akomodasi, transportasi, dan katering, serta menjanjikan perbaikan ke depan. **rdn**



# Ingatkan Pelayanan Penyelenggara Haji



Ketua DPR RI Puan Maharani.

**K**etua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan menjelang puncak ibadah haji 1446 H/2025 M yang akan berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia menekankan pentingnya Pemerintah memastikan jemaah haji

**Pelaksanaan haji sejauh ini sudah cukup baik, jadi harus terus dipertahankan saat puncak haji. Pastikan jemaah mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Bagi lansia, treatment khusus harus diperhatikan**

Indonesia bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan baik dan nyaman.

Puan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menjalani rangkaian ibadah dengan tertib. Serta kepada petugas haji yang dengan penuh dedikasi terus memberikan layanan terbaik selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

“Pelaksanaan haji sejauh ini sudah cukup baik, jadi harus terus dipertahankan saat puncak haji. Pastikan jemaah mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Bagi lansia, *treatment* khusus harus diperhatikan,” ungkap Puan Maharani, Rabu (4/6).

Adapun puncak ibadah haji tahun ini dimulai pada 9 Zulhijah atau 5 Juni esok hari. Di sinilah momen paling sakral dalam rangkaian ibadah haji berlangsung, dimulai dengan wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, dan bermalam di Mina untuk kemudian melontar jumrah.

Puan berharap semua hal yang diperlukan selama puncak haji sudah dipersiapkan secara maksimal, termasuk tenda mabit. “Momentum puncak haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik, terutama mengingat cuaca ekstrem dan kepadatan yang tinggi,” sebutnya. **aha**



Biro Pemberitaan Parlemen



**PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

M. Ibnukhaldid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**

Rizka Arinindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Prima Danurtirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizat, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Puritno Pranowo, Singgih Kharanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno P.D., Moernoponi, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E.

Indah Ekawati, S.I.Kom.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

Adi Ardiansyah, M.M.

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Jadi Momen Teladani Pengorbanan



FOTO: HDR/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, di sela-sela pemantauan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi, Jumat (6/6/2025).

**M**elalui momen Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menekankan pentingnya meneladani semangat pengorbanan yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, sebagai esensi utama dari perayaan Iduladha. Baginya, nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan tersebut patut menjadi teladan seluruh masyarakat Indonesia, terlebih dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan beradab.

Ia juga menggarisbawahi bahwa momentum Iduladha bukan hanya sekadar ritual penyembelihan

hewan kurban, tetapi momen memperdalam makna ketaatan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi.

"Iduladha adalah hari raya pengorbanan, di mana kita mengenang peristiwa luar biasa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail karena ketaatan dan keberanian keduanya, Allah menggantinya dengan domba," ujar Adies di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, Kamis (5/6).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap perayaan Iduladha kali ini menjadi titik awal tercurahnya

keberkahan dan kenikmatan bagi seluruh bangsa. Di mana, ia menyampaikan optimisme terhadap arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan saat ini.

"Semoga dengan Idul Qurban ini, bangsa kita semakin diberkahi dan menjadi bangsa yang besar, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," imbuhnya.

Hingga hari ke-35 operasional haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan bahwa tidak ada jemaah yang tertinggal dalam pelaksanaan wukuf di Arafah, meskipun sebelumnya sempat terjadi kebingungan di kalangan jemaah. **hdr/um**





Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat konferensi pers usai rapat di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).

## Antisipasi Layanan Puncak Haji

**T**im Pengawas Haji DPR RI menegaskan, distribusi kartu Nusuk bagi seluruh jemaah haji Indonesia harus rampung paling lambat pada Selasa (3/6) pukul 20.00 waktu Arab Saudi (WAS). Pernyataan ini menjadi salah satu poin kesimpulan dalam Rapat Kerja Timwas Haji DPR dengan Menteri Agama selaku Amirul Haji Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch. Irfan Yusuf di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6).

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut bahwa kartu Nusuk merupakan syarat vital bagi jemaah untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Sebab itu, sebutnya,

segenap Timwas DPR RI mendorong percepatan distribusi kartu Nusuk.

“Distribusi kartu Nusuk tidak boleh terlambat karena sangat menentukan akses jemaah terhadap layanan dan transportasi selama puncak haji. Kami minta agar

**Memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi demi memastikan proses ini berjalan tanpa hambatan. Selain itu, mewakili DPR, ia juga mengingatkan kesiapan maksimal guna mendukung mobilisasi jemaah selama fase Armuzna.**

tanggal 3 Juni pukul 20.00 WAS menjadi batas akhir yang tidak bisa ditawar lagi,” ujar Cucun saat menyampaikan poin-poin kesimpulan.

Timwas DPR RI, ungkapnya, turut meminta Kementerian Agama (Kemenag) sekaligus pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi demi memastikan proses ini berjalan tanpa hambatan. Selain itu, mewakili DPR, ia juga mengingatkan kesiapan maksimal guna mendukung mobilisasi jemaah selama fase Armuzna.

Kementerian Agama melalui Sekjen Kamaruddin Amin telah menyampaikan bahwa hingga 2 Juni 2025, seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Kota Makkah. Sebanyak 203.149 jemaah dari 525 kloter sedang memasuki masa tenang menjelang puncak ibadah. “Fokus jemaah saat ini adalah menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan spiritual dan fisik yang menantang,” kata Kamaruddin. **um**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Bersiap Hadapi Digitalisasi Saudi

**A**nggota Timwas Haji DPR RI Marwan Dasopang memperingatkan pentingnya kesiapan Badan Penyelenggara Haji Indonesia dalam menghadapi rencana ambisius Pemerintah Arab Saudi yang menargetkan jumlah jemaah haji mencapai lima juta orang pada tahun 2030. Ia menekankan, jika hal itu berarti membuka sistem haji secara mandiri tanpa pengawasan negara, maka bisa

membahayakan perlindungan terhadap jemaah Indonesia di luar negeri.

“Saudi itu di tahun 2030 sudah menyampaikan kemungkinan akan mengelola jemaah haji sampai 5 juta orang. Tapi hari ini, justru yang terjadi malah pengetatan luar biasa terhadap jemaah,” kata Marwan di Mina, Makkah, Sabtu malam (7/6).

Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, ia mengaku dari sekian kali dirinya berhaji, tahun ini adalah momen dengan kondisi paling lengang. Namun di sisi lain, jemaah juga menghadapi kendala besar karena ketatnya portal-portal pemeriksaan atau *checkpoint* yang diterapkan pemerintah Saudi.

Kondisi ini, menurut Marwan, menunjukkan adanya perubahan besar dalam strategi haji Pemerintah Arab Saudi, yang berkaitan langsung dengan visi besar negara itu untuk tahun 2030. Sejalan dengan Vision 2030, Saudi merancang pengelolaan haji dan umrah secara digital, efisien, dan

**Dari sekian kali dirinya berhaji, tahun ini adalah momen dengan kondisi paling lengang. Namun di sisi lain, jemaah juga menghadapi kendala besar karena ketatnya portal-portal pemeriksaan .**

berskala besar—dengan target lima juta jemaah haji per tahun dan 30 juta jemaah umrah.

Sebab itu, Marwan meminta Badan Penyelenggara Haji (BPH) Indonesia tidak hanya bersikap reaktif terhadap sistem baru yang diterapkan Saudi, tetapi harus mampu memetakan maksud dan arah kebijakan jangka panjang negara tersebut.

“Kita minta badan penyelenggara haji mengevaluasi dan menangkap keinginan Saudi. Kalau Saudi tidak ingin ada jemaah ilegal di sana, berarti kita harus pastikan semua jemaah Indonesia tercatat dan terlindungi,” pungkasnya. **rdn**

Anggota Timwas Haji DPR RI Marwan Dasopang saat ditemui Parlementaria dalam rangka pengawasan ibadah haji di Mina, Makkah, Sabtu malam (7/6/2025).

FOTO: RDN/PDT



# Masalah Katering hingga Transportasi Jemaah



Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub saat ditemui Parlementaria dalam pemantauan ibadah haji di Makkah, Sabtu (7/6/2025).

**A**nggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

“Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” ujar Muslim Ayub di Makkah, Sabtu (7/6).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan bahwa sejumlah

jemaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan. Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh kembali terulang pada musim haji tahun-tahun berikutnya.

“Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” tegas Anggota Komisi XIII ini.

Pansus ini, lanjut Muslim, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah

haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci. Lebih lanjut, Muslim berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

Ia berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji. “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” tutupnya.

 **rdn**



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya

# Titik Balik Spiritual Seorang Hamba

**T**ak semua orang diberi panggilan. Tak setiap jiwa dipilih untuk menjejakkan langkah di Tanah Suci. Sebab haji, rukun Islam kelima, bukan sekadar perjalanan fisik—ia adalah perjalanan hati, perjalanan jiwa, menuju titik balik seorang hamba. Alimudin Kolatlana, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Maluku, merasakan hal itu.

Di tengah kepadatan prosesi ibadah haji tahun ini, ia menyempatkan merenungi makna haji dalam hidupnya. Bagi Alimudin, haji adalah anugerah yang tak semua umat Islam dapat rasakan. Ia mengibaratkannya sebagai “panggilan” yang datang hanya bagi

mereka yang dikehendaki-Nya.

“Haji itu ibadah, seperti syahadat, salat, zakat, dan puasa. Tapi ia hadir dalam nuansa yang

**Ini adalah kali pertama menginjakkan kaki di Tanah Suci. Ia menggambarkan suasana spiritual yang menggetarkan hati—sebuah pengalaman yang diyakininya akan menjadi titik balik dalam kehidupannya sebagai seorang Muslim.**

sangat berbeda,” ungkap politisi Fraksi Partai Gerindra itu dengan mata yang tampak berkaca-kaca di Mina, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (8/7).

Bagi Alimudin, ini adalah kali pertama menginjakkan kaki di Tanah Suci. Ia menggambarkan suasana spiritual yang menggetarkan hati—sebuah pengalaman yang diyakininya akan menjadi titik balik dalam kehidupannya sebagai seorang Muslim.

“Ketika sampai di tanah tempat para Nabi dan Rasul berjuang, hati ini bergetar. Kita sadar betapa kecilnya diri kita. Betapa banyak yang harus kita benahi dalam hidup ini,” tuturnya lirih.

Ia mengaku, selama menjalankan rangkaian ibadah haji, dirinya merasa seperti sedang dimurnikan kembali. Seolah setiap langkah di Mina, setiap detik di Arafah, setiap doa di Multazam, menjadi detoks jiwa dari keangkuhan dan kepalsuan dunia.

 **rdn**



FOTO: RDN/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlana, saat ditemui Parlementaria dalam pemantauan ibadah haji di Makkah, Sabtu (7/6/2025).



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih, saat kegiatan pemantauan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025).

## Puji Kesabaran Luar Biasa Jemaah

**A**nggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih memberikan apresiasi dan pujian setinggi-tingginya kepada para jemaah haji Indonesia tahun ini. Di tengah berbagai tantangan dan masalah layanan yang muncul, para jemaah dinilai menunjukkan kesabaran, ketangguhan, dan semangat yang luar biasa dalam menyempurnakan rukun Islam kelima.

Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, kesabaran jemaah haji Indonesia menjadi cerminan kekuatan mental dan spiritual

yang patut dicontoh. Meskipun menghadapi masalah krusial seperti keterlambatan transportasi hingga tenda yang kelebihan kapasitas, para jemaah tidak melakukan protes atau demonstrasi.

“Kami menilai luar biasa jemaah haji kali ini. Kesabaran dan kesungguhannya, di tengah problematika eksternal begitu rupa, tetapi masih bersemangat untuk menunaikan ibadah haji,” ujar Fikri di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6).

Fikri mengatakan Timwas menyoroti beberapa permasalahan serius yang terjadi di puncak haji.

Salah satunya adalah keterlambatan transportasi yang menyebabkan banyak jemaah stres. Sejak Rabu (4/6) Waktu Arab Saudi (WAS) pagi, banyak jemaah yang sudah siap berangkat ke Arafah namun hingga Kamis pagi, saat wukuf akan dimulai, mereka belum juga diangkut.

“Mereka hanya menyampaikan keluhan bahwa kami sudah siap dari hari Rabu pagi, tapi sore belum diangkut, malam belum diangkut, Kamis pagi yang mestinya harus sudah di Arafah belum diangkut juga,” lanjut legislator PKS ini.

Puncak dari pengorbanan jemaah terlihat ketika layanan bus kembali bermasalah saat pergerakan dari Muzdalifah ke Mina untuk lempar jumrah. Tak kunjung dijemput, para jemaah memutuskan untuk berjalan kaki bersama menempuh jarak 6 hingga 7 kilometer. **rdn**



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya

# Cetak Petugas Haji Profesional

**A**nggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan kualifikasi petugas haji, khususnya yang berasal dari daerah atau dikenal sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

Ia menyayangkan masih banyak petugas yang tidak menjalankan tugas secara maksimal selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

“Terlihat di lapangan, banyak petugas yang menjalankan tugas hanya sebagai aji mumpung. Mereka ke Saudi untuk berhaji, bukan fokus melayani jemaah.

Padahal tugas mereka sangat penting,” ujar Selly di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (6/6).

Menurut Selly, pelatihan petugas saat ini belum cukup memadai. Banyak dari mereka hanya mengikuti diklat singkat selama 3 hingga 5 hari tanpa pendalaman lapangan. Bahkan, ia menyoroti fakta bahwa beberapa petugas justru tiba di Arab Saudi setelah jemaah lebih dulu tiba.

“Ini catatan yang sangat fatal. Apalagi nanti di tahun 2026, penyelenggara haji akan dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Maka ke depan harus ada standar pelayanan minimum yang

**Terlihat di lapangan, banyak petugas yang menjalankan tugas hanya sebagai aji mumpung. Mereka ke Saudi untuk berhaji, bukan fokus melayani jemaah.**

lebih ketat dan profesional,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia juga menilai, tidak semua petugas memiliki kemampuan dasar yang semestinya dimiliki, seperti bahasa Arab, pemahaman teknis tugas di lapangan, serta disiplin waktu dan lokasi. Selly bahkan mendorong ke depan adanya penggunaan teknologi *geotagging* dan aplikasi pelaporan berkala agar kinerja petugas bisa terpantau secara *real-time*. **— rdn**

Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI Selly Andriany Gantina saat pemantauan ibadah haji di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (6/6/2025).



FOTO: UBD/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Sri Meliyana, saat melakukan peninjauan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, Arab Saudi, Kamis (29/5/2025).

## Kunjungi Jemaah Sakit di KKHI

**A**nggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Sri Meliyana, bersama sejumlah Anggota Komisi IX dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah untuk meninjau kondisi jemaah haji yang sedang dirawat. Kunjungan ini bertujuan memastikan proses evakuasi jemaah sakit ke Makkah berjalan lancar.

“Kami dari DPR RI, khususnya Komisi IX bersama kawan-kawan

dari komisi lain dan Ketua DPR, mengunjungi pasien yang dirawat di KKHI untuk hari ini evakuasi ke Makkah,” ujar Sri Meliyana kepada media usai peninjauan di Madinah, Arab Saudi, Kamis (29/5).

“Kami melihat langsung kondisi di sini, di ambulans bahwa mereka akan didampingi oleh seorang dokter dan seorang perawat sesuai dengan protap ambulans,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Hingga saat ini, KKHI Madinah telah merawat sejumlah jemaah haji yang sakit. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap, dengan

mempertimbangkan kondisi medis jemaah. Jemaah yang telah stabil dan aman untuk dipindahkan akan dibawa ke KKHI Makkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Selain itu, Timwas Haji juga mengevaluasi kesiapan fasilitas kesehatan haji di Makkah untuk menerima jemaah yang dievakuasi. Sri Meliyana menekankan pentingnya koordinasi antara KKHI Madinah, KKHI Makkah, dan petugas haji untuk memastikan pelayanan kesehatan optimal bagi jemaah haji Indonesia.

Sementara itu, data terbaru dari Kementerian Agama RI mencatat bahwa hingga 27 Mei 2024, terdapat 17 jemaah haji Indonesia yang wafat, dengan mayoritas berada di Madinah. Penyebab utama adalah penyakit jantung, dan sebagian besar merupakan jemaah lansia dengan risiko tinggi. **rdn**



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya

# Jemaah Haji Terhambat Akses Kesehatan

**P**enyelenggaraan ibadah haji 2025 kembali menjadi sorotan, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah persoalan yang ditemukan dalam pelayanan haji tahun ini, khususnya yang berkaitan dengan akses kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.

Dalam peninjauan awal yang dilakukan oleh Tim Pengawas Haji DPR RI, Nur Purnamasidi mengungkapkan adanya laporan terkait pembatasan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis Indonesia yang bertugas di hotel-hotel jemaah haji.

“Saya mendapat laporan bahwa tenaga kesehatan kita di hotel-hotel tidak diberi akses untuk memberikan layanan kesehatan kepada jemaah, karena dibatasi oleh pihak kesehatan dari pemerintah Arab Saudi,” ungkapnya di Madinah, Arab Saudi, Rabu (28/5).

Ia menilai situasi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Panitia Penyelenggara Haji

Indonesia (PPHI) memahami sepenuhnya kebijakan dan peraturan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. “Kebijakan ini saya yakin bukan hal baru. Ini

justeru menjadi pertanyaan besar: mengapa larangan tersebut tidak diketahui oleh petugas kesehatan kita?” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Nur Purnamasidi menyampaikan bahwa dalam sembilan hari ke depan, Timwas DPR akan melakukan pemantauan langsung di lapangan, termasuk berdialog dengan jemaah dan petugas haji. Tujuannya adalah menggali informasi lebih dalam guna merumuskan akar permasalahan, apakah berasal dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah Arab Saudi atau dari sisi koordinasi dan pemahaman para petugas haji Indonesia. **uf,aft/rdn**

Anggota Timwas Haji DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi saat melakukan pemantauan ibadah haji 2025 di Madinah, Arab Saudi, Rabu (28/5/2025).



**Timwas DPR akan melakukan pemantauan langsung di lapangan, termasuk berdialog dengan jemaah dan petugas haji**



FOTO: UBD/PDT

# Pembentukan Kodam Baru di Lampung



Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama saat kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025).

**A**nggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama mendukung rencana pemekaran komando wilayah dengan membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Provinsi Lampung. Hal ini disampaikannya usai kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (28/5).

Menurut Yudha, pemekaran diperlukan demi meningkatkan efektivitas pengamanan dan pelaksanaan tugas TNI di wilayah Sumatera bagian selatan. Ia menilai cakupan Kodam II/Sriwijaya saat ini terlalu luas sehingga perlu dibentuk Kodam baru yang akan membawahi Provinsi Lampung dan Bengkulu.

“Pemekaran ini diperlukan mengingat wilayah Kodam II/Sriwijaya sangat luas. Dengan

**Pemekaran diperlukan demi meningkatkan efektivitas pengamanan dan pelaksanaan tugas TNI di wilayah Sumatera bagian selatan. Ia menilai cakupan Kodam II/Sriwijaya saat ini terlalu luas sehingga perlu dibentuk Kodam baru**

adanya Kodam baru yang berkedudukan di Lampung, diharapkan pelaksanaan tugas TNI bisa lebih optimal,” ujarnya.

Selain isu pemekaran, Yudha juga menyoroti pentingnya peran semua gender dalam TNI, selama tetap menjunjung profesionalisme. Ia menegaskan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tetap dihormati, namun penempatan harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan satuan.

“Kita sepakat bahwa peran perempuan dan laki-laki itu setara. Tapi profesionalisme harus dijunjung tinggi, sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing satuan TNI,” katanya. **afr/aha**



# Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi II ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong penerapan konsep “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola” dalam pembangunan Provinsi Bali. Menurutny,

pendekatan ini penting agar pengelolaan Bali tidak lagi bersifat sektoral dan terpisah-pisah, melainkan terintegrasi secara menyeluruh antarwilayah dan lintas sektor.

“Satu pulau, satu pola, satu tata kelola ini adalah melihat Bali yang

lebih komprehensif. Melihat Bali tidak sepotong-potong dalam satu kawasan wilayah tapi juga melihat Bali dari keseluruhan wilayah dalam satu yang terintegrasi,” ujar Aria Bima dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Denpasar, Bali, Rabu (28/5).

Aria menilai bahwa Bali memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan holistik di Indonesia. Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan kabupaten/kota di dalamnya yang telah mulai menerapkan sistem tata kelola terpadu. Salah satu indikator keberhasilannya, menurutnya, adalah capaian digitalisasi layanan pertanahan yang telah menyentuh angka di atas 90 persen.

“Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan Bali juga harus dilihat dari satu sektor sebagai wilayah ketahanan pangan untuk wilayah Bali. Satu tata kelola antara pariwisata dengan tata ruang dan juga transportasi. Bali juga harus dilihat tidak hanya pariwisata yang tidak terkoneksi dengan lingkungan sampahnya. Jadi saya melihat ini cara berpikir yang holistik bisa menjadi kota percontohan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Aria Bima juga mengapresiasi ide integrasi data dan pemantauan terhadap aktivitas wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali. Ia mengingatkan bahwa banyak turis asing yang datang namun tidak terpantau keberadaannya selama berada di wilayah Bali karena lemahnya sistem konektivitas antara data kedatangan di bandara dengan pemantauan di kabupaten/kota.

 **gal/rdn**



# Peran BUMD terhadap Penerimaan Daerah

**K**omisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus pembahasan pada peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap penerimaan daerah.

Dalam kunjungan ini, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas, mendorong penguatan peran BUMD yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Hari ini, kami (Komisi II DPR RI) di Kepulauan Riau fokus membahas

tentang peningkatan peran serta BUMD, BLUD, dan BMD dalam memberikan kontribusinya kepada penerimaan daerah,” kata Giri di Gedung Graha Kepri, Batam, Kepulauan Riau, hari Rabu (28/5).

Menurut Giri, pengembangan BUMD harus diarahkan pada sektor usaha yang mampu menekan biaya operasional namun tetap

**Fokus membahas tentang peningkatan peran serta BUMD, BLUD, dan BMD dalam memberikan kontribusinya kepada penerimaan daerah**

menghasilkan profit, sehingga berkontribusi nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Diperlukan pengembangan khusus agar BUMD bisa berkembang. Kita (Tim KunKer Reses Komisi II) perlu sampaikan kepada rekan-rekan Komisi II bahwa BUMD harus fokus pada bisnis-bisnis yang bisa menekan biaya-biaya operasional, agar mereka bisa menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap APBD,” tambahnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun menambahkan bahwa pengawasan terhadap BUMD perlu diperkuat melalui peningkatan struktur kelembagaan di Kemendagri. **mun/we**



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas serah terima laporan evaluasi dari Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara usai pertemuan dalam Kunker Reses Komisi II di Gedung Graha Kepri, Batam, Kepulauan Riau, hari Rabu(28/05/2025).

# Kekerasan Seksual Hantui Sumatera Barat



FOTO: YSM/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Sumatera Barat, Rabu (28/5/2025).

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menindak tegas kasus-kasus kekerasan seksual yang belakangan marak terjadi di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Sahroni saat melakukan kunjungan kerja ke Sumbar bersama rombongan tim Komisi III DPR RI. Ia menyoroti laporan terkait dugaan kekerasan seksual yang sudah diterima oleh Polres Kabupaten Lima Puluh Kota. “Ada satu hal perkara yang memang tadi saya sudah sampaikan, dan saya meminta

pelaku dari pada pelecehan seksual segera ditangkap,” ungkap Sahroni usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Sumatera Barat, Rabu (28/5).

Sahroni juga menegaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum agar kasus ini segera ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat demi mencegah kasus serupa meluas di tengah masyarakat.

“Saya minta untuk segera disikapi, ditindak, agar tidak menyebar. Kasus kekerasan seksual ini harus dijadikan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya kasus pelecehan/kekerasan seksual, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media sosial. Sahroni berharap tindakan tegas dari aparat dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menjadi peringatan bagi para pelaku.

— ysm/bia



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Kinerja Polda Bengkulu Tangani Premanisme

**A**nggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Bengkulu yang dinilai berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut disampaikan Adang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Bengkulu, Rabu (28/5).

Menurut Legislator Dapil DKI Jakarta III tersebut, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu telah mendapatkan instruksi langsung dari Markas Besar (Mabes) Polri untuk mengatasi praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Arahannya tersebut telah ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan penegakan hukum, termasuk penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.

**Apresiasi kepada jajaran penegak hukum di Bengkulu telah membuat situasi yang aman dan ini harus terus berjalan**

“Ternyata jajaran Polda Bengkulu sudah mendapatkan instruksi langsung dari Mabes Polri untuk mengatasi premanisme dan telah melakukan kegiatan-kegiatan terhadap penangkapan, terhadap kasus-kasus yang memang melanggar hukum oleh premanisme

tersebut,” ujarnya kepada Parlementaria.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kapolda Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kepala BNNP Bengkulu kepada Komisi III DPR RI, Adang menilai bahwa situasi kamtibmas di Bengkulu secara umum dalam kondisi cukup kondusif. Ia pun menegaskan bahwa tidak terdapat kasus menonjol yang

mengindikasikan gangguan serius terhadap ketertiban umum.

“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran penegak hukum di Bengkulu telah membuat situasi yang aman dan ini harus terus berjalan,” tutup politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. — **pdt/aha**

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu (28/5/2025).



FOTO: PDT

# Tinjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

**D**alam rangka menjalankan fungsi pengawasan, pada Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) kali ini, Tim Kunspek Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Emas, Kota

Semarang, Provinsi Jawa Tengah. “Kami datang kesini tentu dalam rangka melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap infrastruktur transportasi laut hingga sistem logistik nasional,” jelas Huda, usai meninjau langsung Ruang Kontrol Pelindo, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat, (23/5).

Tim Kunspek Komisi V DPR RI melakukan peninjauan langsung Plan and Control Room Pelindo di kawasan pelabuhan Tanjung Emas. Fasilitas ini menjadi pusat kendali operasional pelabuhan yang dilengkapi teknologi pemantauan dan pengelolaan logistik secara real-time, yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengawasan arus barang dan kapal.

“Pelabuhan Tanjung Emas ini adalah pelabuhan kelas 1. Dimana ini adalah pelabuhan utama yang selama ini melayani mulai dari cargo umum hingga melayani terkait dengan jasa orang dan seterusnya. Karena itu kita ingin Pelabuhan Tanjung Emas ini pada posisi Prima dalam melayani berbagai kepentingan dan kebutuhan kita terutama distribusi logistik Baik yang sifatnya ekspor maupun domestik,” jelas Politisi Fraksi PKB itu.

Sebagai informasi, Pelabuhan Tanjung Emas adalah pelabuhan lafut utama yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan ini juga penting sebagai pintu gerbang perdagangan dan logistik di wilayah tengah Pulau Jawa, serta menjadi jalur utama ekspor-impor barang dari dan ke kawasan ini.

**hnm/**  
**aha**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda saat melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (23/5/2025).

FOTO: HNM/PDT

# Percepat Pembangunan Tol Yogyakarta–Bawen

**K**omisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (23/5). Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw itu dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 1. Roberth Rouw menyampaikan kehadiran Jalan Tol Yogyakarta–Bawen sangat penting untuk mempercepat konektivitas dari dan menuju Yogyakarta ke jaringan Jalan Tol Trans Jawa.

“Selama ini, masyarakat membutuhkan waktu sekitar tiga jam untuk dapat terhubung dari Yogyakarta ke Semarang sebelum masuk ke jaringan Tol Trans Jawa. Dengan selesainya tol ini, waktu tempuh bisa dipangkas hingga satu jam saja. Ini akan menjadi alternatif yang sangat signifikan untuk mendukung mobilitas warga dan logistik,” ujar Roberth Rouw usai pertemuan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan tol ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama bagi pengembangan kawasan segitiga emas, yaitu Jogja–Solo–Semarang (Joglosemar). Pembangunan jalan tol ini juga akan mendukung sektor pariwisata, termasuk akses menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Candi Borobudur.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI mencermati beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah jalur tol yang melintasi

kawasan cagar budaya dan lahan milik Kesultanan Yogyakarta, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam pengerjaannya.

Selain itu, Komisi V DPR RI mengingatkan agar hak-hak para subkontraktor tidak diabaikan.

“Kami menerima banyak keluhan bahwa subkontraktor sering tidak dibayar tepat waktu oleh BUMN mitra. Ini harus menjadi perhatian serius agar proyek ini tidak menyisakan masalah,” tegasnya.

— pun/rdn

Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (23/5/2025).



FOTO: PUN/PDT

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Serukan Peran Krusial MBG

**T**ingginya angka *stunting* di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian utama Komisi IX DPR RI. Para anggota dewan menyoroti pentingnya program pemberian makanan bergizi gratis dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah gizi kronis ini.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nauroji, mendesak agar akar masalah *stunting* di NTB ditelusuri lebih dalam. “Perlu dicari akar masalahnya, apakah sejak dalam kandungan kurang gizi, atau setelah anaknya lahir, atau karena tidak mendapatkan ASI eksklusif karena

orangtuanya harus bekerja di luar negeri (PMI),” ujar Nauroji di Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/5).

Ia meyakini bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah seharusnya bisa berperan besar dalam mengurangi *stunting*. Nauroji juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG bukan hanya tugas pemerintah pusat. Ia menekankan kewajiban pemerintah daerah (Pemda) untuk menganggarkan dana dari APBD guna membangun Satuan Penyelenggara Pemberian Gizi (SPPG) atau dapur gizi

“Pemda jangan lepas tangan,

saya menyarankan setiap pemda wajib membangun dapur gizi,” tegasnya, menyoroti manfaat besar program ini dalam mengurangi *stunting*.

Senada dengan Nauroji, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menekankan pentingnya penentuan Calon Penerima, Calon Lokasi (CPCL) yang tepat dalam program MBG yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini bertujuan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka *stunting*.

Netty juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BGN, dan Badan POM. “Sehingga menu yang disajikan betul-betul adalah menu atau makanan yang aman dari berbagai cemaran makanan dan tidak berujung pada kasus keracunan makanan,” tegasnya. — **rnm/aha**



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Anggota Komisi IX DPR RI, Nauroji, saat pertemuan di Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/5/2025).

# Tata Ulang Penerimaan Mahasiswa PTN-PTS

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti berbagai permasalahan mendasar dalam tata kelola perguruan tinggi. Hal itu khususnya terkait tumpang tindih dalam sistem penerimaan mahasiswa, kurikulum, hingga penguatan muatan lokal.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan mahasiswa agar tidak

**Pentingnya pengaturan kembali mekanisme penerimaan mahasiswa agar tidak saling tumpang tindih. Banyak usulan dari kampus agar hal ini bisa ditata lebih baik untuk menjaga ekosistem pendidikan tinggi tetap sehat dan berimbang**

saling menekan antar perguruan tinggi, terutama antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS).

“Tadi dibahas pentingnya pengaturan kembali mekanisme penerimaan mahasiswa agar tidak saling tumpang tindih. Banyak usulan dari kampus agar hal ini bisa ditata lebih baik untuk menjaga ekosistem pendidikan tinggi tetap sehat dan berimbang,” ujarnya yang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, saat rapat bersama Perwakilan Pemerintah Kemendikti Saintek dan Kepala LLDIKTI beserta jajaran Perguruan Tinggi di Denpasar, Bali, Rabu (28/05/2025).

juga menjabat sebagai Ketua Tim Kunker Komisi X usai rapat bersama Perwakilan Pemerintah Kemendikti Saintek dan Kepala LLDIKTI beserta jajaran Perguruan Tinggi di Denpasar, Bali, Rabu (28/5).

Selain itu, ia juga menyoroti usulan terkait penyempurnaan kurikulum, terutama peningkatan jam pelajaran untuk muatan lokal yang dinilai penting untuk memperkuat identitas dan budaya daerah.

“Bali, misalnya, mengusulkan agar jam untuk muatan lokal

ditambah. Ini penting untuk menjaga dan mengembangkan budaya daerah melalui pendidikan tinggi. Setiap provinsi punya kekayaan budaya yang bisa jadi kekuatan nasional,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Masukan lainnya datang terkait penyaluran program-program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kami menekankan pentingnya penataan ulang sistem distribusi agar lebih adil dan merata. **upi/rdn**



# Kunjungi *Sport Center* di Deli Serdang

**K**omisi X DPR RI melakukan Kunjungan Reses (Kunres) Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2024-2025 di Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (28/5). Kegiatan dimulai dari pagi mengunjungi *Sport Center*, Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, dilanjutkan meninjau sekolah terbaik SD 105855 PTPN II Tanjungmorawa, lalu peninjauan sekolah yang rusak butuh perbaikan di SD 101891 Simpang Penara, kemudian acara pertemuan tim Kunres Komisi X bersama Bupati Deli Serdang dan jajarannya.

Ketua tim kunres Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengatakan, kegiatan tersebut sesuai dengan

fungsi DPR dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sudah selesai, legislasi dalam hal ini untuk menyerap masukan dari daerah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta fungsi penganggaran untuk program-program yang dibutuhkan daerah.

“Kunres ini salah satu fungsi kami sebagai pengawasan terhadap Pembangunan yang sudah selesai serta fungsi legislasi dalam hal ini prioritas RUU Sisdiknas yang sedang berjalan sangat penting masukan-masukannya,” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ikut mendampingi mitra kerja Komisi X yakni dari Kementerian Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Kementerian Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sofyan Tan menyebutkan kunres yang mereka lakukan tidak sekadar cakap-cakap, namun turut juga memberikan solusi konkret terhadap persoalan di daerah.

“Untuk itulah seluruh *stakeholder* terkait turut dihadirkan untuk segera menuntaskan persoalan yang ada. Termasuk juga terkait hasil kunjungan mereka ke sekolah-sekolah di daerah yang rusak butuh revitalisasi bahwa di tahun 2025 akan terealisasi segera,” ungkapnya.

— **tn/gal/aha**



FOTO: TN/PDT

Ketua tim kunres Komisi X DPR RI Sofyan Tan saat mengunjungi *Sport Center*, Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (28/5/2025).



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw bersama jajaran meninjau langsung Stadion Utama Riau dan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dalam rangka pengawasan pembangunan infrastruktur nasional, Kamis (19/6/2025). Komisi V mendorong optimalisasi infrastruktur demi mendukung konektivitas, industri, dan layanan publik. FOTO: ICA/AHA



# HOUSE news



@tvr.parlemen



@tvrparlemen



DPR RI



DPR RI



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri